

ABSTRAK

Lingkungan permukiman kumuh digambarkan sebagai bagian yang terabaikan dari lingkungan perkotaan dimana kondisi kehidupan dan penghidupan masyarakatnya sangat memprihatinkan, yang diantaranya ditunjukkan dengan kondisi lingkungan hunian yang tidak layak huni, tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, sarana dan prasarana lingkungan yang tidak memenuhi syarat, tidak tersedianya fasilitas pendidikan, kesehatan maupun sarana dan prasarana sosial budaya kemasyarakatan yang memadai. Pemerintah memberikan perhatian yang cukup besar dalam permasalahan permukiman. Pemerintah Kota Padang menyadari hal ini, kemudian untuk memberlakukan kebijakan terkait dengan penanganan permukiman kumuh. Hal ini dapat kita lihat banyaknya kebijakan dan program-program untuk penanganan permukiman kumuh. Maka dari itu, Penelitian ini bertujuan, untuk menganalisis implementasi kebijakan penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Purus dan menganalisis upaya penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik analisis deskriptif kualitatif menggunakan observasi dan wawancara mendalam yang ditujukan kepada pihak-pihak instansi pemerintah daerah yang terkait dan tokoh masyarakat. Substansi yang dianalisis adalah implementasi kebijakan penanganan permukiman kumuh. Hasil penelitian yang ditemukan dilapangan bahwa implementasi kebijakan belum optimal dalam program peremajaan, berupa kegiatan perbaikan jalan lingkungan, perbaikan drainase, pengelolaan sampah, sanitasi (jamban) dan rehab rumah tidak layak huni. Namun, masih banyak ditemukannya permasalahan pelaksanaan kegiatan perbaikan prasarana permukiman di Kelurahan Purus meliputi pembuatan MCK Komunal tidak terlaksana, masih banyak ditemukan pembuangan sampah ke sungai, dan jalan lingkungan yang rusak. Diharapkan kepada pemerintah yaitu Pemerintah perlu upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak bertempat tinggal di permukiman kumuh, Pemerintah Kota Padang perlu adanya konsistensi program Pemerintah Kota Padang dalam penanganan permukiman kumuh di kelurahan Purus, Pemerintah Kota Padang harus merangkul masyarakat dalam pembuatan kebijakan tentang penanganan permukiman kumuh.

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Permukiman Kumuh

ABSTRACT

A slums is commonly pictured as an ignored part of urban neighbourhood where the occupants' living conditions are of grave concern. These poor conditions are characterized by inhospitable dwelling condition, overcrowded residency, substandard structural and infrastructural inadequacies, unavailable educational facilities, and lack of health and sociocultural infrastructures. The city government has given a special attention on this housing issue. Numerous policies and programs have been launched to improve slum conditions. This research is accordingly dedicated to identify and analyse slum upgrading management policy by the government of Padang City in Purus Village of the West Padang Sub-District. Since this is a qualitative study, data that are obtained through field observations and in-depth interviews with the involving parties such as related government institutions and community leaders, are analysed descriptively by substantially focusing on the slum upgrading management policy. Results of this field study show that the policy has been implemented in forms of local roads improvement, drainage system renovation, improved waste management, sanitation renovation, and housing rejuvenation. However, there are some more issues of the implementation of residence infrastructure improvement programs that are found, such as the failure in constructing communal sanitation facility, waste dumpings into the river, and local road damages. The city government is expected to sufficiently disseminate information to the slum community on the effects of slum residency. In order to ensure sustainability in the slum upgrading program implementation, the Padang city government should establish a strong partnership with members of the slum community.

Keywords: Implementation, Policy, Slum